



## Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengantisipasi Krisis Identitas Generasi Muda

Alifia Mutsla Fakhruddin <sup>a,1\*</sup>, Dinie Anggraeni Dewi <sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>1</sup> alifiamutsa@upi.edu\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 2 Januari 2023;

Revised: 18 Januari 2023;

Accepted: 27 Januari 2023.

Kata-kata kunci:

Implementasi Nilai;

Prinsip Pancasila;

Pedoman Hidup.

---

### : ABSTRAK

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal intoleransi dalam hidup sosial warga negara. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai itu menjadi landasan yang menjadi fokus peneliti untuk menyelesaikan masalah intoleransi dalam hidup sosial warga negara. Penelitian ini menggugurkan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah. Hasil penelitian menemukan dua poin penting yaitu pertama, nilai-nilai dasar dalam Pancasila perlu dimengerti dari konsep abstrak menjadi bentuk-bentuk tindakan untuk menatap perbedaan sebagai suatu kelumrahan. Kedua, nilai ketuhanan universal menjadi pedoman dan sumber bagi sila-sila lainnya untuk mengerti bahwa ada konteks hidup bersama dalam universalitas untuk bisa mengerti tentang manusia, persatuan antar individu dan kelompok yang berbeda, penyelesaian dengan musyawarah, dan terwujudnya keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila di masing-masing pribadi dilakukan dengan menanamkan nilai toleransi dalam diri individu dengan menghargai perbedaan dan menganggap perbedaan sebagai bagian dari kebhinekaan dalam negara.

---

### Keywords:

Urgency of Citizenship Education;

Identity Crisis;

Young Generation.

---

### ABSTRACT

*The Urgency of Citizenship Education in Anticipation of the Youth Identity Crisis. The study aim is to examine the urgent side of Citizenship Education for the young generation. The context that occurs because the younger generation is in a identity crisis. The trouble of younger generation is making decisions in solving problems both personally, in the family, and in society relationships. However, the situation is not everyone understands its function, so its function can not be fully implemented. This study examines the situation and context of the younger generation with a qualitative approach that uses library research. The results describe, first, Citizenship Education to be the preparation of the younger generation to become citizens with the process of internalization in three dimensions of knowledge, proficiency, and values. The second is that there is an urgent situation that must be realized by teachers, parents, and policy makers in the country to implement these three dimensions so that the younger generation does not get caught up in the identity crisis. The implementation of three capabilities can be a reference and guideline for the younger generation to actively participate in education, families and communities, and the country.*

---

Copyright © 2023 (Alifia Mutsa Fakhruddin & Dinie Anggraeni Dewi). All Right Reserved

How to Cite : Fakhruddin, A. M., & Dewi, D. A. (2023). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengantisipasi Krisis Identitas Generasi Muda. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(1), 1–6.

<https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i5.223>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Indonesia saat ini berada dalam demografi. Situasi bonus demografi ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur usia yang ada pada warga negara. Indikator perubahan tersebut ditandai dengan menurunnya rasio perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (usia kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun) atau yang disebut sebagai *dependency ratio*. Bonus demografi menjadi fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali dalam sejarah suatu bangsa. Ini mengingat bonus demografi terjadi ketika proporsi jumlah penduduk usia produktif berada di atas 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan. Bonus demografi, dengan demikian terjadi bila rasio ketergantungan angkanya berada di bawah 50 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, & BPS, 2018).

Bonus demografi ada dalam diri generasi milenial. Generasi milenial kerap disebut Generasi Z yang lahir rentang tahun 2001 sampai dengan 2010. Generasi Z ini merupakan peralihan dari Generasi Y atau generasi milenial pada saat teknologi sedang berkembang pesat. Pola pikir Generasi Z cenderung serba instan. Namun sebagai catatan, generasi tersebut belum akan banyak berperan pada bonus demografi Indonesia pada 2020, oleh karena situasi psikologi generasi tersebut berada dalam situasi krisis identitas. Krisis yang dikarenakan mereka ada dalam situasi pencarian diri, peralihan dari diri individu menjadi bagian warga negara. Situasi ini membuat mereka dituntut untuk semakin bertanggung jawab, bisa menentukan diri, dan tetap mampu berkontribusi bagi negara. Maka, pendidikan kewarganegaraan yang telah mereka pelajari di sekolah sebagai teori atau gagasan, perlu untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

*Civic* adalah kata bahasa Inggris yang artinya warga negara atau kewarganegaraan, kata tersebut diambil dari bahasa Latin yaitu *Civicus* yang artinya kewarganegaraan. Dari kata *Civic* lahirlah kata *Civics* atau yang kita kenal sebagai ilmu kewarganegaraan dan *Civic Education* yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran Kewarganegaraan (PKn) sudah di kenal di Indonesia dari sejak zaman kolonial Belanda atau yang saat itu disebut *Burgerkunde*. Tujuan dari ilmu kewarganegaraan tentu tidak lepas dari sisi membangun bangsa, antara lain: pertama, mencerdaskan bangsa yang mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu seperti nilai-nilai yang tersusun dalam Pancasila, nilai-nilai itulah yang kita pegang dan bersumber dari kepribadian bangsa karena dibentuk berdasarkan hati nurani bangsa. Kedua, secara khusus, PKn bertujuan untuk membina moral dengan harapan dapat terwujud di kehidupan sehari-hari. Ketiga, mempelajari PKn adalah bentuk partisipasi dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik seorang warga negara. Dengan mempelajari PKn kita dapat berperan dalam proses politik yang sehat dan perbaikan dalam lingkungan masyarakat.

Secara umum, PKn bertujuan untuk mendidik siswa agar menjadi warga negara yang baik yaitu warga negara yang toleran, demokratis, beragama, patriotik, setia terhadap bangsa dan negara, dan Pancasila sejati. Hal yang dapat kita lihat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada bagaimana konsep kenegaraan itu ditanam dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari-hari. Lantas apakah fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan? Fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah: (1) membantu generasi muda dalam memahami cita-cita negara; (2) generasi muda dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah baik dalam lingkungan negara, masyarakat, dan pribadi; (3) generasi muda dapat mengapresiasi dan berpartisipasi sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan cita-cita negara; (4) sebagai refleksi generasi muda dalam cara berpikir dan bertindak yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Rahayu, 2007).

Fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan kembali berpusat pada cita-cita negara, yaitu seperti yang tertulis pada Pancasila sebagai dasar negara yang berisi harapan-harapan para pejuang bangsa yang membangun negara. Tetapi kenyataannya nilai Pancasila justru semakin memudar dari diri bangsa, hal ini tentu saja berdampak buruk bagi negara apalagi jika dialami generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal tersebut diminimalkan agar kita menghasilkan generasi muda yang unggul bagi negara.

Wacana untuk menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai Pendidikan nilai. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan media yang sangat ampuh dalam membentuk kecerdasan sekaligus kepribadian manusia secara profesional. Maka, pendidikan nilai perlu dikembangkan sehingga akan menghasilkan generasi muda yang bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Generasi muda bisa bertumbuh dan berkembang bila ada upaya untuk mendidik, membiasakan dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara (Asyafiq, 2016).

## Metode

Artikel ini merupakan kualitatif dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang memusatkan perhatian pada Kajian ini berangkat dari suatu cara pandang bahwa adanya situasi urgen dari generasi muda dalam pencarian identitas yang memiliki kaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Artikel ini dibuat untuk mendeskripsikan situasi urgen tersebut dengan menggunakan beberapa sumber pustaka seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tema penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan pembacaan teks, dan memberi pemahaman, untuk ditemukan simpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Fungsi dan peranan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Winataputra & Budimansyah (2012) untuk mengemban misi untuk membentuk keperibadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam *nation and character building*. Dalam konteks ini, peran PKn bagi kehidupan bernegara dan berbangsa sangat strategis. PKn bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang pintar dan baik (*to be good and smart citizens*). PKn, dengan demikian merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.” (Kariadi, 2017)

PKn adalah pelajaran yang wajib diadakan oleh peserta didik dalam jenjang apapun, seperti apa yang telah dituliskan dalam UUD No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan wajib memuat pelajaran yang salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa ilmu ini memiliki peran yang penting dalam mewujudkan cita-cita negara dan membentuk karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.

Upaya untuk mempelajari PKn dapat meningkatkan peserta didik dalam berpikir rasional, kreatif, dan kritis dalam menanggapi isu kewarganegaraan salah satunya sikap anti-korupsi. Tetapi dapat kita rasakan bahwa nilai-nilai Pancasila justru semakin memudar, padahal Pancasila adalah cita-cita negara dan juga tujuan dari PKn sendiri diadakan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana orang-orang semakin sulit untuk berinteraksi secara langsung sehingga cenderung lebih individualis karena jarang terjadi bersosialisasi dengan orang lain. Akan sulit bagi seorang peserta didik terutama yang masih mempelajari dasar-dasar, peran pendidik dalam menumbuhkan rasa patriotisme sangat penting. Pendidik harus bisa tetap optimal walaupun hanya dengan pembelajaran *daring* tanpa diadakan upacara bendera atau lomba-lomba secara langsung yang biasa diadakan saat hari-hari nasional.

Kegiatan seperti itu sebenarnya masih bisa dilaksanakan meskipun secara *daring*, sehingga sejarah dan hari-hari penting akan selalu diingat oleh peserta didik. Peserta didik juga harus tahu jika Indonesia mengalami krisis identitas dan kesenjangan budaya atau yang bisa kita sebut *Culture Lag* yaitu di mana suatu norma dan nilai memudar yang menimbulkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Indonesia sudah jelas ialah negara hukum, Indonesia juga memiliki hukum budaya yang banyak karena keberagamannya. Hukum budaya kerap kali dianggap kuno dan ketinggalan jaman, padahal itu adalah sesuatu yang harus dilestarikan.

Faktor dari terjadinya krisis identitas dan kesenjangan budaya salah satunya adalah karena kemajuan teknologi. Tentu saja kemajuan teknologi adalah hal yang tidak bisa dihindari karena teknologi bisa sangat berguna bagi negara jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Krisis identitas dan kesenjangan budaya adalah wujud dampak negatif dari kemajuan teknologi, di mana siapapun dapat

mengakses berbagai hal dengan mudah baik dari dalam negara maupun negara luar. Nilai-nilai baru juga dapat dengan mudah masuk sehingga terjadilah degradasi nilai. Di mana nilai-nilai baru yang sebenarnya tidak sesuai dengan jati diri negara Indonesia justru lebih berkembang. Padahal nilai-nilai baru belum sepenuhnya dipahami, tetapi nilai-nilai lama mulai ditinggalkan. Tanpa kita sadari kita semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan identitas bangsa.

Pendidik harus memperhatikan hal-hal tersebut karena itulah pantangannya di era globalisasi seperti ini. Pendidik harus mau memutar otak untuk membuat pendidikan kewarganegaraan dapat mencapai cita-citanya, dimulai dari memperkecil pengaruh negatif dari nilai-nilai asing yang akan berdampak pada degradasi nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Tidak hanya memberi ilmu kewarganegaraan saja secara materi seperti bank di mana pendidik adalah sumber ilmu dan peserta didik hanya menerima transfer ilmu dari guru tersebut. Tapi bisa mengajak peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan kewarganegaraan dalam lingkungan apapun dan di manapun dengan semangat bela negara dalam dirinya.

Pantangan dalam mewujudkan pendidikan kewarganegaraan bagi anak-anak mungkin tidak akan sesulit mahasiswa, karena anak-anak masih labil sehingga dapat dengan mudah diarahkan selama dapat disampaikan dengan menarik dan asyik. Berbeda jika sudah berhadapan dengan mahasiswa, karena karakter mereka sudah sangat matang dan pemikirannya sudah rasional dan kritis. Tentu saja mereka sudah banyak mengerti berbagai hal mengenai ketatanan negara, tidak jarang jika semakin dewasa maka kepercayaan negara justru semakin rendah dan rasa semangat ingin berpartisipasi aktif dalam berpolitik juga semakin rendah. Padahal mahasiswa adalah agen perubahan, tapi masih ditemukan mahasiswa yang individualis dan memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan negara. Mereka cenderung menutup mata dan telinga seakan tidak ingin tahu apa yang terjadi pada negaranya.

Sejarah membuktikan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dan besar dalam perjalanan bangsa untuk mencapai tujuan negara. Mahasiswa lah yang dapat menyuarakan suara rakyat dan berdiri bersama rakyat untuk dapat mewujudkan negara yang sejahtera. Jika mahasiswa tidak mengikuti perkembangan kewarganegaraan di Indonesia dan tidak memiliki semangat bela negara maka bagaimana ia bisa menyuarakan suara rakyat? PKn diwajibkan bagi mahasiswa agar dapat menumbuhkan kesadaran bela negara dan agar mahasiswa memiliki antusiasme dan motivasi dalam mengkaji masalah kebangsaan.

PKn penting bagi generasi muda sebagai penyiapan generasi muda untuk menjadi warga negara dengan adanya proses internalisasi pada tiga dimensi pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai. Internalisasi itu ditujukan oleh karena: pertama, agar generasi muda mengetahui kewajiban dan haknya sebagai warga negara. Dengan begitu ia akan menjadi pelopor kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkemanusiaan, berkeadilan, dan berdemokrasi. Kedua, berpikir kritis dalam menanggapi hal nasional maupun internasional. Yaitu dengan menjadi agen perubahan yang membawa perubahan dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, pendidikan, budaya yang berkelanjutan tanpa menghilangkan jati diri Indonesia. Ketiga, memiliki pribadi yang bertoleransi tinggi dengan menerima dan memahami perbedaan karena keberagaman dalam suku, bahasa, budaya, agama, dan segala perbedaan lainnya. Sehingga perbedaan tidak menjadi kendala dalam memajukan negara, justru menjadi sebuah keberagaman yang memperkokoh persatuan.

Keempat, menjadi pribadi yang mencintai kedamaian. Tidak menimbulkan perpecahan dan tidak melakukan hal-hal anarkis adalah salah satu wujud seseorang itu mencintai kedamaian dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Kelima, menjadi pribadi yang mau mengenal dan mau berpartisipasi dalam kehidupan dalam lingkungan apapun. Ia akan sebisa mungkin memberi warna dan menjadi sosok yang bermanfaat bagi sekitarnya. Hal kecil yang dapat kita lakukan adalah dengan berbagi ilmu yang kita punya. Itulah alasan-alasan utama mengapa ilmu kewarganegaraan penting bagi generasi muda. Sebagai generasi mudah, maka sudah seharusnya kita menumbuhkan semangat bela negara dan

dorongan untuk tidak hanya memajukan diri tapi juga memajukan negara dan membawa perubahan yang berarti bagi negara.

Peran pendidik sangat penting sebagai sosok yang memberi generasi muda bekal ilmu dan yang secara langsung menghadapi mereka. Pendidik harus bisa memastikan bahwa ia tidak hanya sekedar menasfer ilmu, tapi lebih dari itu sehingga meninggalkan kesan yang berarti bagi peserta didik. Pendidik juga tentu harus menyesuaikan cara mengajar mereka dengan peserta didik, bagi mahasiswa mungkin akan lebih baik jika mereka ditanamkan kesadaran akan pentingnya peran ia sebagai agen perubahan yang berorientasi langsung dengan masyarakat. Jika negara bermasalah, maka ia memiliki rasa tanggung jawab dan berpartisipasi untuk menyelamatkan bangsanya bukannya menutup mata dan telinganya seakan tidak mau tahu dan tidak ingin turun tangan. Sebagai mahasiswa seharusnya mereka sudah dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menanggapi permasalahan negara.

Tidak hanya pendidik dan peserta didik, pemerintah juga harus dapat terus menjadi lebih baik karena kenyataannya kepercayaan masyarakat terhadap politik di Indonesia semakin rendah. Tidak ada keserasian antara pemerintah dan masyarakat, tidak ada pula kerja sama antara keduanya. Hubungan antara pemerintah harus dibenahi, pemerintah perlu didisiplinkan sehingga masyarakat dapat kembali percaya dan mengandalkan pemerintah. Jika persatuan sudah terwujud di mana pemerintah dan rakyatnya bisa saling merangkul, maka akan lebih mudah untuk mewujudkan cita-cita negara bersama dan bangsa pun akan semakin kokoh.

Faktor internal tentu sangat penting untuk diperhatikan, tetapi faktor eksternal juga merupakan ancaman yang tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dampaknya juga sangat besar bagi moral anak muda. Akan sangat menyakitkan jika moral anak muda dirusak karena faktor eksternal, apalagi sampai nilai Pancasila dalam diri mereka. Kemajuan teknologi tidak bisa dihindari, jadi generasi muda lah yang harus memiliki kesadaran dalam menggunakan hasil dari kemajuan tersebut. Jangan sampai kemajuan yang seharusnya membawa perubahan besar justru menjadi menjerumuskan. Dalam hal ini, kerja sama antara pendidik dan orang tua sangat penting. Pendidik akan kesulitan jika orang tua tidak menanamkan kewarganegaraan di lingkungan keluarga, contohnya orang tua harus tegas dalam mengawasi dan mengatur penggunaan internet.

Teknologi internet tentu sudah menjadi kebutuhan, tapi anak-anak harus selalu diawasi agar tidak terkena dampak negatif yang tidak hanya berdampak pada ia sendiri tapi juga pada bangsa. Bagaimana pun ia adalah generasi penerus bangsa, jangan sampai moralnya rusak dari umur emas. Orangtua dapat secara langsung mengawasi karena orangtua memfasilitasi anak. Mereka yang memberi maka ia harus bisa mempertanggung jawabkan dampak apa yang akan terjadi jika anak terlepas dari pengawasan. Dari adanya situasi urgen akan situasi anak yang merupakan bagian dari generasi muda, maka guru, orangtua, dan pengambil kebijakan dalam negara perlu untuk mengimplementasikan pengetahuan, kecakapan warga negara, dan nilai-nilai agar generasi muda tidak terjebak dalam krisis identitas (Wadu, Kasing, Gultom, & Mere, 2021).

Hal yang harus diperhatikan dan tidak kalah penting adalah di mana kita sekarang sedang mengalami pandemi Covid-19, semuanya serba terbatas dan banyak hal yang harus kita hindari. Semuanya pasti sudah sangat jenuh dengan keadaan ini yang mengharuskan kita beraktivitas secara daring, untuk menumbuhkan semangat bela negara tentu akan semakin sulit karena untuk hidup saja orang-orang bekerja keras (Gultom, 2021). Oleh karena itu, sudah seharusnya kita saling membantu dan mendukung satu sama lain untuk tetap optimal melaksanakan kehidupan yang sesuai dengan tujuan kewarganegaraan dan yang terpenting untuk tetap hidup sejahtera dan bahagia.

## **Simpulan**

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi generasi muda agar memiliki moral dan kepribadian yang sesuai dengan cita-cita bangsa seperti yang tertulis pada Pancasila sebagai identitas negara yang berisi harapan para pejuang bangsa untuk generasi penerus. Simpulan dari penelitian ini



yaitu pertama, ada dalam situasi dan konteks dimana Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penyiapan generasi muda untuk menjadi warga negara dengan adanya proses internalisasi pada tiga dimensi pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai. Kedua, bahwa adanya situasi urgen yang mesti disadari oleh guru, orangtua, dan pengambil kebijakan dalam negara untuk mengimplementasikan tiga dimensi tersebut agar generasi muda tidak terjebak dalam krisis identitas. Ketiga kemampuan itu dengan implementasi konkret bisa menjadi acuan dan pedoman bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan, keluarga dan masyarakat, serta negara.

## Referensi

- Asyafiq, S. (2016). Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 29-37.
- Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Djahiri, (1995). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Data Press. Maftuh dan Sapriya, 2005, *Hakikat dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung. PT. Umbara Utama.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34
- Gultom, A. F. (2021). *Beriman di Masa Pandemi*. Medan: CV. Sinarta
- Hasanah, A. (2012). Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Minoritas (Studi atas Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Baduy Banten). *Analisis*, XII(1), 209–228.
- Humaidi. (2019). Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Generasi Milenial. Vol. XIX No. 1.
- Izma Tri, dan Vira Yolanda Kesuma. (2019) Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa. *Wahana Didaktika* Vol. 17 No.1 Januari 2019: 84-92.
- Juliardi, B. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *jurnal Bhinneka Tunggal Ika*. 2(2), 3.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan BPS. (2018). *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Nurmalisa Yunisca, Ana Mentari, dan Rohman. (2020). Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Civic Conscience. Vol. 7 No. 1, Mei 2020, pp. 34-46.
- Rahayu, M. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grasindo.
- Soemantri, (2010). *Internalisasi PKn dalam Pendidikan dan Pengajaran*. Surabaya: PT. Alva Media.
- Wadu, L. B., Kasing, R.N.D., Gultom, A. F., & Mere, K. (2021, April). *Child Character Building Through the Takaplayer Village Children Forum*. In 2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210413.008>.
- Wahyu Alfi, (2014). *Generasi Muda-Generasi Penerus Bangsa*. Jakarta: Piramida Press